

**HUKUMAN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DITINJAU MENURUT FIQIH JINAYAH
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)



Oleh:

YENI KUSNITA
NIM. 10624003803

**PROGRAM S1
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

**FAKULTAS SYA'RIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
2011**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“Hukuman Bagi Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah (Study Kasus Pengadilan Negeri Pekanbaru)”**.

Dipengadilan Negeri pekanbaru anak-anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana tetap dikenai hukuman, namun hukuman yang dijatuhkan terhadap anak dibawah umur tidaklah sama dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap orang dewasa. Akan tetapi dalam fiqh jinayah anak dibawah umur tidak bisa diberikan hukuman ataupun pertanggungjawaban pidana karena anak dibawah umur tidak memenuhi syarat untuk diberikan hukuman pokok, namun dipengadilan Negeri dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak dibawah umur juga atas dasar berbagai pertimbangan. Jadi hukuman yang divonis oleh hakim pengadilan negeri terhadap anak dibawah umur apakah sama atau bisa dibenarkan menurut fiqh jinayahnya?

Adapun yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri pekanbaru terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana dan tinjauan fiqh jinayahnya terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang terletak di Jln. Teratai No. 85 Pekanbaru Riau. Adapun yang menjadi metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan study dokumentasi.

Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yaitu yang terdiri dari pihak-pihak yang terkait dalam menyelesaikan kasus ini dan terdakwa itu sendiri, karena populasi dalam penelitian ini tidak terlalu banyak, maka penelitian ini tidak menggunakan sampel.

Dari uraian-uraian yang disajikan dan dari berbagai tinjauan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri pekanbaru terhadap anak dibawah umur, seperti kasus pencurian hukuman yang dijatuhkannya adalah selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari penjara dan kasus pemerasan hukumannya adalah 5 (lima) bulan penjara, bahwa hukuman yang dijatuhkan itu bukanlah sepenuhnya hukuman pokok dari tindak pidana itu sendiri. Tapi hukuman pokok yang sudah dikurangi 1/3 (sepertiga) dari hukuman pokok, disebabkan pelakunya adalah anak dibawah umur.

Dalam fiqh jinayah anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri bisa dibenarkan, karena dalam fiqh jinayah anak dibawah umur tidak dikenai hukuman, bisa saja untuk kemaslahatan. Jika anak dibawah umur tersebut tidak dikenai hukuman, maka ia akan meraja lela. Maka anak tersebut bisa saja dikenai hukuman pengganti. Sebagai pengganti dari hukuman pokoknya adalah hukuman ta'zir. Sedangkan ta'zir adalah hukuman yang sifatnya pengajaran atau mendidik yang mana hukumannya tidak diatur oleh nash, akan tetapi diserahkan kepada ulil amri untuk menentukan bentuk-bentuk hukumannya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini bisa saja ulil amri membebaskannya dari hukuman atau bisa saja dikenai hukuman.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN NEGERI	
A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri	11
B. Tujuan Didirikan Pengadilan Negeri	13
C. Bagan atau Struktur Pengadilan Negeri.....	13
D. Wewenang Pengadilan Negeri.....	19

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN

HUKUMAN DALAM JINAYAH

A. Pengertian Tindak Pidana dan Dasar Hukum Tentang

Tindak Pidana.....27

B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana..33

C. Pengertian Hukuman dan Dasar Hukum Tentang Hukuman43

D. Macam-macam Hukuman dan Tujuan Hukuman45

E. Syarat-syarat Untuk Menjatuhkan hukuman51

F. Sebab-sebab Hapusnya Hukuman52

BAB IV HUKUMAN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIPENGADILAN NEGERI PEKANBARU DITINJAU MENURUT FIQIH JINAYAH

A. Bentuk Hukuman Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Pengadilan Negeri

Pekanbaru terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak
Pidana57

B. Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Hukuman Yang

Dijatuhkan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Terhadap Anak
Dibawah Umur Yang MelakukanTindak Pida.....62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan70

B. Saran71

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukuman adalah penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain¹. Hukuman disini terbagi 2 (dua) kelompok, yaitu hukum pidana dan hukum perdata.

Hukum pidana dalam Islam dinamakan Fiqih Jinayah. Pengertian Fiqih Jinayah disini terbagi dalam beberapa pendapat, diantaranya pendapat para *ahli fiqh adalah tindakan-tindakan yang diharamkan syara', berupa kejahatan-kejahatan dan usaha-usaha yang dilakukan menyangkut pada jiwa, harta benda dan lainnyan yang diancam dengan hukuman had dan ta'zir*².

Dalam Fiqih Jinayah suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana dan berbeda anatara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain³.

Adapun unsur-unsur umum ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Unsur formal, yaitu ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

¹ Drs. H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 59

² Drs. H. M. Nasir Cholis, *Fiqih Jinayah*, (Pekanbaru: Susqa Press, 2000), h.2

³ *Ibid*

- b. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana, baik berupa nyata maupun sikap.
- c. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya⁴.

Sedangkan unsur khusus yaitu ketentuan-ketentuan yang dilanggar itu khusus memberi ciri khas pada bentuk tindakan jarimah yang dilakukan. Di mana setiap jarimah yang dilakukan akan berbeda ciri-cirinya, misalnya pada pencurian. Ciri khususnya adalah mengambil barang secara sembunyi, sedangkan pada perampokan adalah mengambil barang dengan jalan kekerasan, dan sebagainya⁵.

Apabila suatu tindak pidana sudah memenuhi unsurnya, maka akan dikenakan hukuman. Ada beberapa macam hukuman yang terdapat dalam fiqih jinayah, yaitu:

- a. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud seperti zina, pencurian, pemberontakan dan lain-lain.
- b. Hukuman qisas dan diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qisas dan diat seperti pembunuhan sengaja, pembunuhan karena kesalaham (tidak sengaja) dan lain-lain.
- c. Hukuman kifarar, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qishash dan diat dan beberapa ta'zir seperti pembunuhan karena kekeliruan (tidak sengaja) dan menyerupai sengaja.

h. 22 ⁴ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2007),

⁵ Drs. H. M. Nasir Cholis, *Op. Cit*, h. 9-10

- d. Hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang belum ada ketentuan syara' dan diserahkan kepada ulil amri⁶.
- e. Agar hukuman itu dapat diakui keberadaannya maka harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a) Hukuman harus ada dasarnya dari syara'.
 - b) Hukuman harus bersifat pribadi atau perorangan.
 - c) Hukuman harus berlaku untuk umum. Umum disini dimaksudkan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, baik orang dewasa maupun anak-anak⁷.

Sungguhpun demikian dalam jinayah ada ketentuan yang harus diperbaiki lagi, apabila yang melakukan tindak pidana itu anak yang belum dewasa (baligh), bisa saja tidak dikenakan hukuman pokok, yaitu diganti dengan hukuman lainnya sebagai pengganti hukuman pokok.

Sekalipun dengan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menjadi suatu lembaga peradilan, yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara, yang diajukan kepadanya, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah banyak menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana, yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak dibawah umur, dan menjatuhkan hukuman terhadapnya, seperti:

- a) Kasus pembunuhan pasal 338
- b) Kasus pencurian pasal 363
- c) Kasus pemerasan pasal 368
- d) Dan lain-lain.

⁶ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2004), h. 144-158

⁷ *ibid*

Untuk menangani perkara pidana yang tersangka atau terdakwa adalah anak dibawah umur, maka pada tanggal 03 Januari 1997 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3886 sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak⁸.

Di samping pertimbangan diatas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Hal ini, dapat dibedakan dalam penerapan sanksi pidananya yang berbeda dengan sanksi orang dewasa, sebagai suatu perhatian khusus dan dedikasi terhadap anak, karena anak yang melakukan suatu tindak pidana merupakan anak yang memiliki masalah dan harus ada suatu perhatian khusus dalam pembinaannya⁹.

Hakim pengadilan negeri pekanbaru telah menyelesaikan perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur, dalam kasus pemerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, hakim memvonis terdakwa 5 (lima) bulan penjara dan membayar ongkos perkara Rp 3000,-(tiga ribu rupiah).

Sedangkan vonis hukuman kasus diatas berbeda lagi dengan vonis hukuman kasus pencurian, yang mana dalam kasus pencurian yang dilakukan

⁸ Rika Saraswati, S.H., CN., M. Hum, *Hukum perlindungan Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: PT Citra Aditya Abadi, 2009), h.33

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Perlindungan Anak UU No. 23 Tahun 2002 Penjelasan umum Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada alenia ke-5*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), h. 82.

oleh anak dibawah umur tersebut dihukum 3 (tiga) bulan penjara dan 15 (lima belas) hari penjara dihitung dari mulai menjadi tahanan dan membayar ongkos perkara sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah).

Dalam fiqh jinayah anak-anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana juga bisa dikenakan hukuman atau sebaliknya, namun hukuman yang divonis oleh hakim pengadilan negeri terhadap anak dibawah umur apakah sama atau bisa dibenarkan menurut fiqh jinayah?

Dari fenomena tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut lagi. Maka penulis tuangkan dalam penelitian ini dengan judul **“Hukuman Bagi Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah (Study Kasus Pengadilan Negeri Pekanbaru)”**.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarah pembahasan dalam skripsi ini, penulis membatasi pembahasan dengan apa saja bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan negeri kepada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana dan tinjauan fiqh jinayahnya terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana di pengadilan negeri pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dalam latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan negeri kepada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayahnya terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana di pengadilan negeri pekanbaru ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayahnya terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana di pengadilan negeri pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis, baik secara teoritis maupun secara praktek yang berhubungan dengan masalah menjatuhkan hukuman khususnya bagi anak.

- b. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang masih menyangkut dan berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Penelitian ini sebagai pelengkap tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada fakultas syari'ah dan ilmu hukum UIN susqa pekanbaru.

E. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang terletak di Jln. Teratai No. 85 Pekanbaru Riau. Pengambilan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan lokasinya mudah dijangkau dan tidak terlalu jauh dari peneliti, sehingga bisa menghemat biaya.

b. Subjek dan Objek Penelitian

- a) Subjek penelitian ini adalah pelaku atau anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana dan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian kasus tersebut di Pengadilan Negeri.
- b) Objek penelitian ini adalah hukuman yang dijatuhkan kepada anak dibawah umur.

c. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini dan pelaku itu sendiri. Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 12 orang.

Mengingat populasi dalam penelitian ini tidak terlalu banyak, maka penelitian ini tidak menggunakan sampel.

d. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari orang-orang yang bersangkutan dalam kasus ini melalui wawancara dan dokumentasi.
- b. Data Skunder yaitu data yang diperoleh dari vahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, undang-undang, dan pendapat para ahli yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

e. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu turun langsung kelapangan.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada informan tentang masalah yang diteliti.
- c. Study Dokumentasi

f. Metode Analisa Data

Dalam menulis dan membahas permasalahan, penulis mengutamakan metode, sebagai berikut:

- a. Deskriptif Analitik, yaitu menjelaskan atau menguraikan data yang dikemukakan, kemudian dianalisa secara teliti.
- b. Deduktif, yaitu dengan cara berfikir yang diawali dengan pengumpulan data yang bersifat umum, kemudian diuraikan dan dijelaskan serta mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

- c. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada yang umum.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan umum tentang Pengadilan Negeri, yang terdiri dari Sejarah Singkat Pengadilan Negeri, Tujuan Didirikan Pengadilan Negeri, Bagan atau Struktur Pengadilan Negeri dan Wewenang Pengadilan Negeri.

Bab III : Tinjauan umum tentang Tindak Pidana dan Hukuman, yang terdiri dari Pengertian Tindak Pidana dan Dasar Hukum tentang Tindak Pidana, Bentuk-bentuk Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Hukumssan dan Dasar Hukum tentang Hukuman, Macam-macam Hukuman dan Tujuan Hukuman, Syarat-syarat Untuk Menjatuhkan Hukuman, dan Sebab-sebab Hapusnya Hukuman.

Bab IV :Hukuman Bagi Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah, yang terdiri dari Bentuk Hukuman Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bagi Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana dan Tinjauan Fiqih Jinayahnya Terhadap Hukuman Yang Dijatuhkan Oleh Hakim

Pengadilan Negeri Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan
Tindak Pidana.

Bab V :Kesimpulan dan Saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM

TENTANG PENGADILAN NEGERI

A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri

Pembentukan kota Madya pekanbaru sebagai ibu kota propinsi Daerah tingkat 1 Riau, sebelumnya telah melalui sejarah yang panjang. Proses bermula dari sebuah dusun yang kecil yang terletak dipinggir sungai siak yang disebut dengan nama payung sekaki. Dusun ini disebut senapelan¹⁰.

Dusun Senapelan mengalami perkembangan pada kerajaan Siak Sri Indrapura, sebab ia merupakan bagian dari kerajaan Siak sri Indrapura itu sendiri. Dengan perkembangan yang begitu pesat sehingga membutuhkan tempat mengadakan transaksi (pekan atau pasar) untuk melakukan kegiatan jual beli sekali dalam satu pekan atau satu minggu¹¹.

Karena jumlah hari seminggu itu 7 (tujuh) hari dan diantara tujuh transaksi itu dengan pekan. Kerajaan Siak dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alimuddin Syah (wafat tahun 1971) beliau digantikan oleh putranya sendiri yang bergelar Sultan Muda Muhammad Ali Abdul Jalil Muazam Syah.

Niat Sultan Muda ini untuk mewujudkan kembali pekan didusun Senapelan tidak dapat dilahirkan dalam waktu relatif singkat. Kendati demikian kegigihan beliau dapat mewujudkan kembali pekan tersebut

¹⁰ Dokumentasi *Pengadilan Negeri* 1997

¹¹ *Ibid*

walaupun tidak tepat pada tempat semula tetapi sudah beralih tempat disekitar pelabuhan sekarang.

Berdasarkan keterangan almarhum Suahil, pekan yang didirikan pada 12 Rajab hari selasa, menurut bulan masehinya jatuh pada tanggal 23 juni 1781 M. oleh karena bangunan yang baru dibuat nama pekanbaru, kemudian pada tanggal itu diberi nama hari lahirnya kota pekanbaru¹².

Dengan pesatnya perkembangan pekanbaru tersebut sehingga masyarakat sudah banyak dan menginginkannya suatu lembaga untuk menyelesaikan suatu perkara yang dinamakan pengadilan, maka pada Pengadilan Negeri yang berada dalam wilayah tingkat Idikota madya pekanbaru, dijalan teratai sehingga lebih dikenal dengan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pendirian Pengadilan Negeri Pekanbaru seiring dengan pemindahan kota PropinsiRiau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Kemudian dari tahun 1950 hingga menjelang 1982 Propinsi Riau belum mempunyai Pengadilan Tinggi sendiri, oleh sebab itu terjadilah kasus sampai tingkat banding, maka hal ini diselesaikan di Pengadilan Tinggi Padang. Setelah tahun 1982 barulah Propinsi Riau memiliki Pengadilan Tinggi sendiri, yang berkedudukan dijalan Jendral Sudirman¹³.

Selain Pengadilan Negeri masih ada lagi Pengadilan yang berkedudukan di Propinsi Riau, antara lain:

¹² *Ibid*

¹³ Nursal Darwis, SH (hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru), *wawancara*, tanggal 11 noveber 2010

1. Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara tingkat banding.
2. Pengadilan Agama
3. Pengadilan Tinggi Agama kompetensi yang absolut, yang menyelesaikan masalah yang menyangkut masalah hukum agama, seperti masalah perkawinan dan perceraian.
4. Pengadilan Tata Usaha Negara¹⁴.

Demikianlah sekilas berdirinya Pengadilan Negeri Pekanbaru menurut sejarah yang ada.

B. Tujuan Didirikan Pengadilan Negeri

Adapun tujuan didirikannya Pengadilan Negeri adalah:

1. Untuk mencegah tindakan /perbuatan yang melanggar hukum.
2. Untuk menyelesaikan perselisihan guna memperoleh keadilan.
3. Terwujudnya kesatuan yang harmonis.

Dapat kita lihat beberapa banyak sudah diselesaikan perkara-perkara yang membutuhkan suatu keadilan dipengadilan negeri pekanbaru. Itulah tujuan utama dari adanya lembaga Peradilan dikota Pekanbaru¹⁵.

C. Bagan atau Struktur Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Pekanbaru mempunyai 3 (tiga) ruang siding memeriksa perkara, antara lain ruang siding induk yang bias digunakan untuk

¹⁴ Dokumentasi *Pengadilan Negeri Pekanbaru*, Op. Cit

¹⁵ *Ibid*

memeriksa perkara pidana, sedangkan 2 (dua) ruang lainnya digunakan untuk perkara perdata.

Adapun pendirian Pengadilan Negeri Pekanbaru telah banyak mengalami perubahan dan pergantian ketua, yaitu:

1. Tahun 1950-1960 ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Sulaiman SH.
2. Tahun 1960-1965 ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Zaidir Lamid SH.
3. Tahun 1965- 1972 ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Abdul Jalil Sati SH.
4. Tahun 1972-1981 ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Wajihar Harkam SH.
5. Tahun 1981-1983 ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Syamsul Bahri SH.
6. Tahun 1983-1987 ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Ida Bagus Adniyana SH.
7. Tahun 1987-1990 ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Setyo Harsono SH.
8. Tahun 1990-1993 ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Achmadi SH.
9. Tahun 1993-1995 ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Arzan Yahya SH.
10. Tahun 1995-1996 ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Yusuf Thoha SH.
11. Tahun 1996-1999 ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Sarmin SH.
12. Tahun 2000-2001 ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Asmal Abdullah SH.
13. Tahun 2002-2003 ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Asmal SH.
14. Tahun 2003- ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Sumantri SH.

Berkenaan dengan jumlah hakim selalu berubah-ubah dari tahun pertama berdirinya Pengadilan Negeri Pekanbaru sampai sekarang ini, yang bertugas menyelesaikan perkara, baik perkara pidana maupun perdata.

Sedangkan jumlah hakim sekarang yang menangani kasus pidana dan perdata berjumlah 11 (sejumlah) orang, yaitu:

1. Yusuf Thoha SH sebagai Hakim Ketua
2. Ny Theresia SH sebagai Wakil Ketua
3. Kornel P. Siantun SH
4. Pangestu SH
5. N. Bety Aritonang SH
6. Pangkat Purba SH
7. Tani Ginting SH
8. Osmar Simanjuntak SH
9. J. Suhadi SH
10. Asril Marwan SH
11. DRS. P. Harahap Sh

Adapun struktur kepanitraan/ kesekretariatan Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut:

TABEL I
STRUKTUR KEPANITERAAN/ KESEKTERIATAN PENGADILAN
NEGERI KELAS I B PEKANBARU

NO	NAMA	JABATAN
01	Mery Ulfa. SH	Panitera Sekretariat
02	Afrida Yunita	Wakil Panitera
03	Samsul Ferbri	Wakil Sekretariat
04	O. Simbolan	Panitera Bidang Perdata
05	E.Simanjuntak	Panitera Muda Pidana
06	Ruslan SMHK	Panitera Muda Bidang Hukum
07	Marlianis	K.A Urusan Kepegawaian
08	Nidar Ibrahim	K.A Urusan Keuangan
09	Darwin Dus. SMHK	K.A Urusan Umum

Sumber Data: Pengadilan Negeri

Tugas penyelenggaraan administrasi ketua Pengadilan dibantu oleh kepala kepanitraan sebagai penanggung jawab pelaksanaan administrasi umum serta yang ada dipengadilan negeri tersebut.

Dalam pelaksanaan administrasi umum dibantu oleh kepala kepanitraan perkara. Kepala kepanitraan perkara dalam pelaksanaannya dibantu oleh:

1. Kabag perdata yang bertugas meregister perkara perdata.
2. Kabag pidana yang bertugas meregister perkara pidana.
3. Kabag statisti lebih dahuludan dokumentasi bertugas antara lain:
 - a. Membuat laporan bulanan, kwartal dan tahunan perkara pidana maupun perkara perdata.

b. Statistic, grafik dan arsip yang terdiri dari:

- 1) Bendahara umum.
- 2) Bendahara rutin.
- 3) Bendahara proyek.

Dibidang peradilan, ketua pengadilan dibantu oleh seorang wakil ketua dan beberapa orang hakim. Khusus dipengadilan negeri pekanbaru ada 14 orang hakim termasuk ketua pengadilan. Apabila ketua pengadilan bertugas keluar kota, ketua pengadilan melimpahkan tugas-tugasnya kepada wakil ketua pengadilan.

Kepala pengadilan sebagai administrasi pengadilan barwewenang menentukan biaya perkara dipengadilan. Adapun biaya perkara tersebut ditentukan oleh ketua pengadilan dengan periode sekali dalam setahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan perkara dipengadilan negeri pekanbaru dan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Sebelum perkara diajukan.

Sebelum perkara diajukan, seseorang yang ingin berperkara secara berperiode lebih dahulu mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan. Permohonan itu diperiksa oleh ketua pengadilan, dengan adanya bukti seperti surat keterangan miskin yang diberikan oleh lurah atau kepala desa setempat, maka kemudian dibuat penetapan untuk berperkara secara berperiode. Penetapan tersebut nantinya merupakan dasar bagi pihak penggugat untuk mengajukan dan mendaftarkan perkara di kepanitraan.

2. Bersamaan dengan gugatan.

Jika diajukan sekaligus dalam gugatan, maka terlebih dahulu diperiksa permintaan penggugat untuk berperkara secara berperiode. Dengan memanggil tergugat pihak lawan. Jika pihak lawan keberatan atas permintaan penggugat tersebut maka pihak lawan membuktikan bahwa penggugat itu adalah orang mampu.

Berlainan dengan perkara pidana, yang mana apabila seseorang terdakwa dijatuhkan dipersidangan, yang didapat dengan hukuman 5 (lima) tahun, dapat memperoleh bantuan hukumannya disebabkan oleh pemerintah. Untuk pengadilan negeri pekanbaru, biaya perkara diberikan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi ongkos perkara tetap dibayar terdakwa, yang dalam hal ini diminta oleh jaksa penuntut umum (JPU) sebagai executornya.

Penentuan hakim yang akan menyidangkan perkara perdata dipengadilan negeri pekanbaru ditentukan oleh ketua pengadilan, dan untuk ketua majelis ditentukan berdasarkan senioritasnya, kepangkatan maupun pengalamannya. Majelis hakim yang telah mendapatkan untuk memeriksa perkara dan tidak dicampuri oleh sesuatu kekuatan manapun. Hakim mempunyai hak untuk menentukan perkara yang ditanganinya dan ketua pengadilan negeri secara langsung tidak dapat mengawasi maupun menindak hakim jika ada tunggakan perkara.

Biaya-biaya yang diperlukan oleh pihak yang berperkara dipengadilan negeri pekanbaru dalam mengajukan perkara, antara lain:

1. Biaya pendaftaran surat kuasa.
2. Biaya praskot sita.
3. Biaya putusan.
4. Biaya eksekusi.
5. Biaya pemungutan uang.
6. Biaya surat buku.
7. Biaya pemeriksaan dilapangan¹⁶.

Demikian cara-cara berpekara secara periode Pengadilan Negeri Pekanbaru secara teratur dan teroganisir dengan baik.

D. Wewenang Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan (yang umum) yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana untuk semua golongan¹⁷

Di dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur tentang wewenang Pengadilan Negeri. Wewenang itu sebahagaian diatur dalam pasal 84, 85, dan 86.

Pasal 84:

Baiklah penulis akan menyebutkan ayat-ayat dari pasal 84 tersebut, yaitu:

1. Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

¹⁶ Sumber Pengadilan Negeri Pekanbaru 2003

¹⁷ Kansil. C. S. T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 373

2. Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
3. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
4. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Maksud ayat 1 diatas adalah untuk menegaskan Pengadilan mana yang berwenang mengadili tindak pidana yang bersangkutan. Kewenangan seperti ini disebut kewenangan *relatife* atau *distributie van rechtsmacht*. Bila ayat 1 diatas dihubungkan dengan ayat 2, tampaklah bahwa ketentuan tersebut mengandung asas *locus delicti* terbatas, yaitu Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri dalam wilayah tindak pidana itu dilakukan. Terbatas disini maksudnya dibatasi oleh ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam ayat 2.

Ayat 2 diatas merupakan pembatasan/ pengecualian dari pada ayat 1 yang dipakai sebagai ukuran kewenangan adalah Pengadilan Negeri tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil.

Ayat 3 menyatakan bahwa pasal ini masih memerlukan penjelasan dan operasionalisasi lebih lanjut, karena ketentuan tersebut mengisyaratkan kemungkinan terjadinya *Jurisdictione Geschil* yaitu persengketaan yurisdiksi secara potensial dapat terjadi, sebab tidak diuraikan tentang urutan wewenang mengadili bagi masing-masing Pengadilan Negeri yang berkepentingan.

Ayat 4 ini mengisyaratkan permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh ayat 3 plus permasalahan baru, yaitu kemungkinan terjadinya penggabungan perkara.

Pasal 85:

Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain dari pada yang tersebut pada pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Dalam penjelasan tersebut diatas, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadaan daerah tidak mengizinkan ialah antara lain tidak amannya daerah atau adanya bencana alam.

Pasal 86:

Apabila seseorang melakukan tindak pidana diluar negeri, yang dapat diadili menurut hokum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.

Pasal 86 diatas menyebutkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita menganut *asas personalitas aktif* dan *asas personalitas pasif*, yang member kemungkinan bahwa tindak pidana yang dilakukan diluar negeri dapat diadili menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia. Dengan maksud agar jalannya Peradilan terhadap perkara pidana tersebut dapat mudah dan lancar, maka ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya¹⁸.

Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa wewenang Pengadilan Negeri itu adalah:

1. Wewenang Mutlak (*Kompetensi Absolut*).

Wewenang mutlak yaitu wewenang badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain, baik dalam lingkungan Peradilan yang sama (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi), maupun dalam lingkungan Peradilan lain (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama). Jadi kompetensi Absolut ini menyangkut masalah dengan materi hokum yang menjadi wewenang dari suatu pengadilan.

¹⁸ Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Sinar Grafika, 1996), h. 39-40

2. Wewenang Nisbi (*Kompetensi Relatif*).

Wewenagn nisbi yaitu kepada Pengadilan Negeri manakah gugatan atau tuntutan hak itu harus diajukan?. Pertanyaan ini menyangkut dengan pembagian kekuasaan kehakiman (Distribusi Kekuasaan Kehakiman). Ataupun yang dinamakan dengan wewenang nisbi dari pada hakim Kompetensi relatif diatur dalam pasal 118 (pasal 142 RBG) yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Sebagai asas ditentukan bahwa Pengadilan Negeri tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat berdomisili), yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak (pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 RBG), diman gugatan harus diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tergugat tinggal. Apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya yang nyata, maka gugatan diajukan pada pengadilan ditempat tergugta sebenarnya tinggal (pasal 118 ayat 1 HIR, pasal 142 ayat 1 RBG).

Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi (pasal 4 Undang-undang No 2 Tahun 1986).

Dalam keterangan diatas dijelaskan pula bahwa daerah hokum Pengadilan Negeri meliputi daerah tingkat II, maka wewenang dari Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah meliputi daerah tingkat I Kotamadya Pekanbaru, yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Sukajadi
2. Kecamatan Pekanbaru Kota
3. Kecamatan Sail
4. Kecamatan Lima Puluh
5. Kecamatan Senapelan
6. Kecamatan Rumbai
7. Kecamatan tampan
8. Kecamatan Bukit Raya

Dengan demikian maka perkara yang terjadi dalam daerah tingkat II pekanbaru merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pekanbaru..

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN HUKUMAN DITINJAU MENURUT FIQH JINAYAH

Sebelum penulis membahas tentang Hukuman maka penulis terlebih dahulu membahas tentang tindak pidana.

A. Pengertian Tindak Pidana dan Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam fiqh jinayah tindak pidana disebut juga dengan Jarimah. Pengertian jinayah secara bahasa adalah *nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya*¹⁹. Pengertian jinayah secara bahasa adalah *suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh sara', baik berupa perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya*²⁰.

Ada beberapa macam pengertian tindak pidana (jarimah) antara lain: menurut bahasa Jarimah adalah *melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama)*²¹.

¹⁹ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. 1

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, h. 9

Pengertian secara umum jarimah adalah *pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi*²².

Pengertian jarimah menurut Imam Al Mawari adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir²³.

Pengertian tindak pidana menurut hukum positif, oleh Mr. Tresna yaitu *rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan maka dikenakan hukuman*²⁴.

Sedangkan tindak pidana dalam hukum positif disebut juga dengan peristiwa pidana atau delik. Tindak pidana yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*Starbaar Feit*". *Staarbaar feit* disini terdiri dari 3 kata, yakni *Star* adalah *pidana dan hukuman*, *baar* adalah *dapat dan boleh*, sedangkan *feit* adalah *tindak, peristiwa, pelanggaran dan pembuktian*²⁵.

Sedangkan menurut istilah tindak pidana adalah *semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana*²⁶. Sedangkan menurut penulis tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ Drs. Adamin Chazawi, S. H, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67

²⁶ *Ibid*

yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) bagi yang melanggar larangan tersebut.

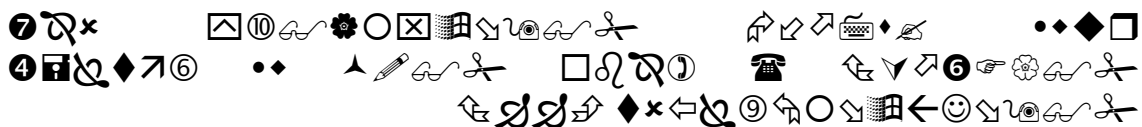
Dalam fiqh jinayah suatu perbuatan baru bisa dikatakan suatu tindak pidana, apabila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c. Unsur moral adalah orang yang cakap (mukallaf), yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih dibawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana²⁷.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana

Sedangkan dasar hukum dari tindak pidana adalah bersumber dari ayat-ayat atau nash Al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

Surat Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi:



²⁷ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 28

*Artinya: "... Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"*²⁸. (QS. Al-Qashash: 77)

Surat Al_Isra' ayat 15 yang berbunyi:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

*Artinya: "Dan kami tidak menghukum manusia, sebelum kami mengutus seorang rasul"*²⁹. (QS. Al-Isra: 15)

Selain ayat-ayat atau nash Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum tindak pidana tersebut diatas, juga bersumber dari kaedah-kaedah yang penting dalam syari'at islam adalah sebagai berikut:

لاحكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص.

*Artinya: "Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat"*³⁰.

Pengertian dari kaedah ini adalah bahwa perbuatan orang-orang yang cakap (mukallaf) tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, selama sebelum ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan ia mempunyai kebebasan

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987), h. 394

²⁹ *Ibid*, h. 283

³⁰ Dr. H. Ahmad Mawardi Muslich, *Op. Cit*, h. 28

untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada nash yang melarangnya³¹.

Pengertian dari kaedah tersebut berkaitan dengan kaedah yang lain, yang berbunyi:

الأصل فى الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم.

Artinya : “Pada dasarnya semua perkara diperbolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”³².

Kaedah tersebut mempunyai pengertian bahwa semua perbuatan dan sikap tidak berbuat diperbolehkan dengan kebolehan asli, artinya bukan kebolehan yang dinyatakan oleh syara’. Dengan demikian selama belum ada nash yang melarangnya maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut³³.

Kesimpulan dari kaedah tersebut adalah sebagai berikut:

لا يمكن اعتبار فعل أوترك جريمة إلا بنص صريح يحرم الفعل أو الترك. فإذا لم يرد نص يحرم الفعل أو الترك فلا مسئولية ولا عقاب على فاعل أو تارك

³¹ Ibid

³² Ibid

³³ Ibid

Artinya : “Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak boleh dianggap sebagai jarimah, kecuali karena adanya nash (ketentuan) yang jelas yang melarang perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Apabila tidak ada nash yang demikian sifatnya, maka tidak ada tuntutan atau hukuman atas pelakunya³⁴.”

Oleh karena itu, perbuatan dan sikap tidak berbuat tidak cukup dipandang sebagai jarimah hanya karena dilarang saja melainkan juga harus dinyatakan hukumannya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari semua kaedah tersebut adalah bahwa menurut syari’at islam tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya nash³⁵.

Disamping kaedah-kaedah tersebut diatas, masih ada kaedah lain yang berbunyi:

لايكلف شرعا إلا من كان قادرا على فهم دليل التكليف أهلا لما
كلف به. ولا يكلف شرعا إلا بفعل ممكن مقدور للمكلف معلوم له
علما يحمله على امتثاله

Artinya : “Menurut syara’ seseorang tidak dapat diberi pembebanan (taklif) kecuali apabila ia mampu memahami dalil-dalil taklif dan cakap untuk mengerjakannya. Dan menurut syara’ pula seseorang tidak dibebani taklif kecuali dengan pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan yang bisa mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut³⁶.”

Kaedah ini menyatakan tentang syarat-syarat yang harus terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai seorang yang bertanggungjawab dan pada

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

perbuatan yang diperintahkan. Adapun syarat-syarat untuk pelaku mukallaf tersebut ada dua macam yaitu:

- a. Pelaku sanggup memahami nash-nash syara' yang berisi hukum taklif.
- b. Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman³⁷.

Dalam hukum positif yang menjadi dasar hukum tindak pidana adalah undang – undang dan kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) misalnya yang terdapat dalam pasal 363 tentang tindak pidana pencurian, pasal 368 tentang tindak pidana pemerasan, dan lain sebagainya

B. Bentuk-bentuk Tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

1) Bentuk-bentuk Tindak Pidana

Dalam fiqh jinayah tindak pidana (jarimah) dibagi menjadi bermacam-macam bentuk. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana (jarimah) terbagi atas:

- a. Ditinjau dari Segi Berat Ringannya Hukuman

Dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:

1. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had.

Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun jarimah-

³⁷ *Ibid*

jarimah yang termasuk dalam jarimah hudud adalah jarimah zina, jarimah menuduh zina, jarimah perampokan, jarimah pembunuhan, jarimah pemberontakan, pencurian, dan jarimah minuman keras.

2. Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik qishash dan diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Adapun jarimah-jarimah yang termasuk dalam jarimah qishash dan diat adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.
3. Jarimah ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

b. Ditinjau dari segi niatnya.

Ditinjau dari segi niatnya, tindak pidana (jarimah) itu dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Tindak pidana (jarimah) sengaja, yaitu pelaku melakukan tindak pidana yang sudah direncanakan. Misalnya: seseorang masuk kerumah orang lain dengan maksud untuk mengambil sesuatu dari rumah tersebut, dan sebagainya.
2. Tindak pidana (jarimah) tidak sengaja, yaitu pelaku tidak sengaja untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Misalnya:

seseorang melempar batu untuk mengusir binatang (anjing), akan tetapi batu tersebut mengenai orang lain, dan sebagainya.

c. Ditinjau dari segi objeknya.

Ditinjau dari segi objek atau sasaran yang terkena oleh tindak pidana (jarimah), maka jarimah itu dapat dibagi dua bagian, yaitu:

1. Tindak pidana (jarimah) perseorangan, yaitu suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu). Misalnya: penghinaan, penipuan, dan sebagainya.
2. Tindak pidana (jarimah) masyarakat, yaitu suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Misalnya: penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi, dan sebagainya.

d. Ditinjau dari segi cara melakukannya.

Ditinjau dari segi cara melakukannya, jarimah dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Jarimah positif adalah jarimah yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, zina dan pemukulan.
2. Jarimah negatif adalah jarimah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau bersaksi, enggan melakukan shalat dan puasa.

e. Ditinjau dari segi tabiatnya.

Ditinjau dari segi motifnya, tindak pidana (jarimah) dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Tindak pidana (jarimah) biasa, yaitu tindak pidana (jarimah) yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan tujuan-tujuan politik. Misalnya: mencuri ayam, membunuh, menganiaya, dan sebagainya.
2. Tindak pidana (jarimah) politik, yaitu tindak pidana (jarimah) yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya: pemberontakan bersenjata, mengacaukan perekonomian dengan maksud politik, perang saudara, dan sebagainya³⁸.

2) Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah *pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu*³⁹.

Dalam syari'at Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang.

³⁸ Prof. Drs. H. A. Djazuli, *Op. Cit*, h. 23-25

³⁹ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. 74

- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu⁴⁰.

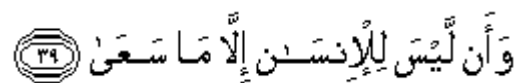
Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban⁴¹.

Orang yang harus bertanggung jawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Faathir ayat 18 yang berbunyi:



Artinya: “Seseorang tidak menanggung dosa orang lain”⁴². (QS. Faathir: 18)

Surat An-Najm ayat 39, yang berbunyi:



Artinya: “Dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang ia usahakan”⁴³. (QS.

An-Najm: 39)

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

⁴² Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 436

⁴³ Ibid , h. 527

Surat Fushshilat ayat 46, yang berbunyi:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ

Artinya: “Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya dan barang siapa yang berbuat kejahatan maka akibatnya atas dirinya”⁴⁴. (QS. Fushshilat: 46)

Adapun tingkata-tingkatan pertanggungjawaban pidana adalah:

a. Sengaja (*Al- ‘Amdu*)

Dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang atau sudah direncanakan sebelumnya. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dengan tingkat dibawahnya.

b. Menyerupai Sengaja (*Syibhul ‘Amd*)

Pengertian Syibhul ‘Amd adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam pertanggungjawabannya menyerupai sengaja berada di bawah sengaja.

⁴⁴ *Ibid*, h. 481

c. Keliru (*Al- Khata'*)

Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Kekeliruan ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Keluri dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang.
2. Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembak seseorang yang disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota pasukan sendiri.

d. Keadaan yang Disamakan dengan Keliru

Ada 2 (dua) bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan, yaitu:

1. Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi di luar pengadilan dan sebagai akibat kelalainnya, seperti seseorang yang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan dan ia menindih bayi itu sehingga bayi tersebut mati.
2. Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalainnya tetapi tanpa dikehendaknya, seperti seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk mengalir air tetapi ia tidak memberi tanda

bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.

Dalam segi pertanggungjawabannya, keadaan ini lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan, melainkan perbuatan itu terjadi semata-mata akibat keteledoran dan kelalaiannya. Sedangkan dalam hal keliru pelaku sengaja melakukan perbuatan, walaupun akibatnya terjadi karena kurang hati-hati⁴⁵.

Pertanggungjawaban pidana dalam fiqh jinayah dapat dihapuskan karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang berkaitan dengan keadaan pelaku. Sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman⁴⁶.

Adapun sebab-sebab dihapusnya hukuman terbagi atas empat macam, yaitu:

a. Paksaan.

Paksaan adalah mendorong orang lain atas sesuatu yang tidak diinginkannya, baik berupa ucapan atau perbuatan.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*, h. 85

b. Mabuk.

Mabuk adalah hilangnya akal sebagai akibat minum minuman keras atau khamar atau sejenisnya.

c. Gila.

Gila adalah hilangnya akal, rusak, atau lemah.

d. Dibawah umur.

Adapun kriteria dikatakan sebagai anak dibawah umur dalam fiqh jinayah, adalah sebagai berikut:

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir (idrak)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Seorang anak yang belum tamyiz, karena belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun, apabila ia melakukan suatu tindak pidana, maka ia tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan hukuman had apabila ia melakukan jarimah hudud dan tidak dikenakan qishash apabila ia melakukan jarimah qishash.

2. Masa kemampuan berfikir yang lemah

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia 19 (sembilan belas) tahun (balig). Pada masa kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas

jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, qishash maupun ta'zir. Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukan tindak pidana dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai pengulang kejahatan.

3. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia 18 (delapan belas) tahun. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya⁴⁷.

Dengan demikian orang gila, orang yang dipaksa, orang mabuk dan anak dibawah umur tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahman dan Abu Daud, yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة عن انائم حتى يستيقظ و عن المبتللى حتى يبرأ و عن الصابى حتى يكبر

⁴⁷ *Op. Cit.*, h. 117-135

Artinya: “*Dari Aisyah ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa*⁴⁸”. (HR. Imam Ahmad dan Abu Daud)

C. Pengertian Hukuman dan Dasar Hukum tentang Hukuman.

1) Pengertian Hukuman

Menurut *Kamus Bahasa Indonesia* karangan S. Wojoyasito, hukuman berarti *siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa)*⁴⁹. Hukuman menurut Abdul Qadir

Audah hukuman adalah *pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat*⁵⁰.

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad hukuman adalah *penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang lain yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu*⁵¹.

Dari defenisi diatas dapat diambil intisari bahwa hukuman adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang

⁴⁸ Jalaluddin As Sayuthi, *Al Jami’ Ash Shagir*, Juz II, Dar Al Fikr, Beirut, h. 24

⁴⁹ Drs. H. Rahmat Hakim, *Op. Cit*, h. 59

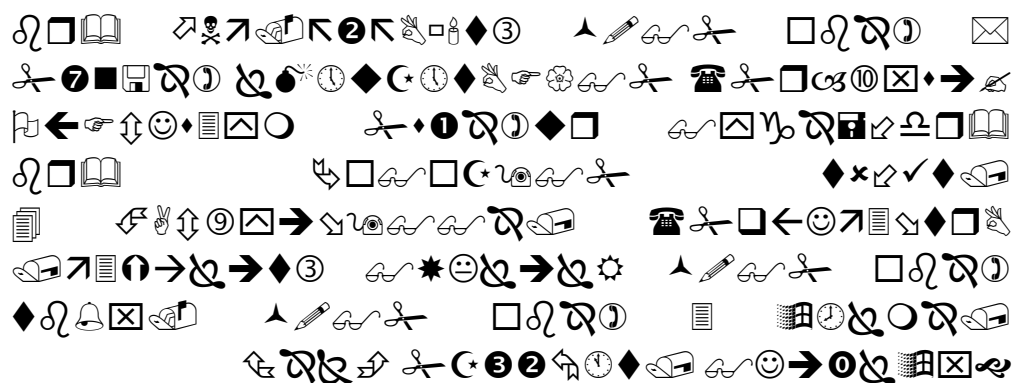
⁵⁰ *ibid*

⁵¹ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h.137

kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.

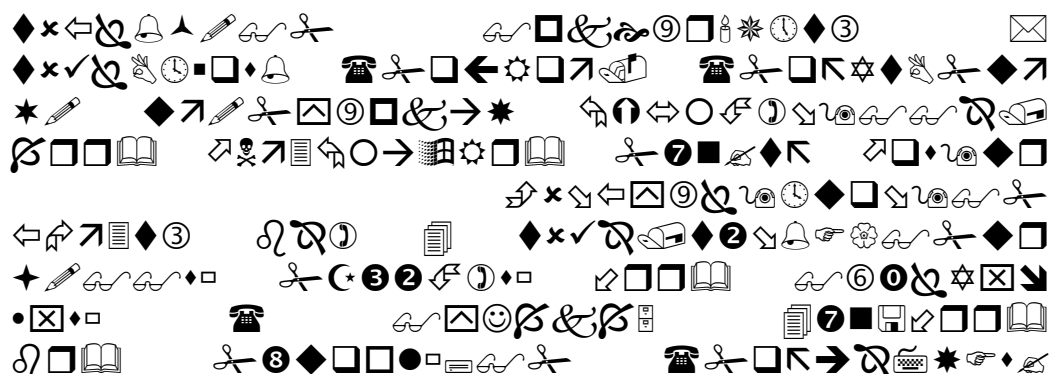
2) Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar dari hukuman adalah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa:58 yang berbunyi”

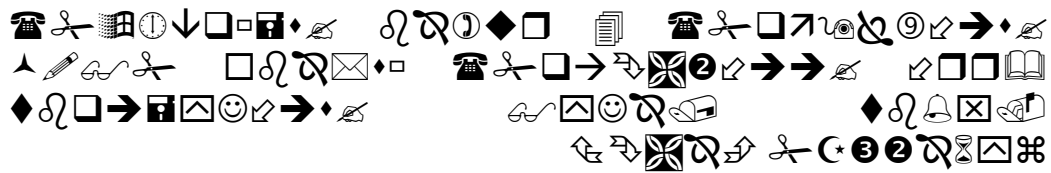


Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”⁵². (QS. An-Nisa: 58)

An-Nisa ayat 135, yang berbunyi:



⁵² Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 87



Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan*⁵³.

Sabda Rasulullah SAW :

القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار. فما الذي في الجنة فرجل عرف الحق ف قضى به. ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار

Artinya: *Dari Abu Harairah, dari ayahnya, dari Rasulullah Saw, mengabarkan bahwa rasulullah bersabda, “Qadhi-qadhi (Hakim-hakim) itu ada dua golongan, satu golongan di surga dan satu golongan di neraka. Adapun qadhi yan ada disurga ialah qadhi yang mengetahui kebenaran lalu dia memberikan keputusan berdasarkan kebenaran. Adapun Qadhi yang mengetahui kebenaran lalu dia curang dalam mengambil keputusan, dia ditempat dineraka. Dan seorang Qadhi yang member keputusan berdasarkan kebodohan, dia juga ditempatkan dineraka”*⁵⁴. (H.R. Abu Daud)

⁵³ *Ibid*, h. 99

⁵⁴ Mustafa Muhammad ‘Immarah, *Jawahir Al Bukhari*, Maktab At Tijariyah Al Kubra, Kairo, cet V, 1356 H

D. Macam-macam Hukuman dan Tujuan Hukuman.

1. Macam-macam Hukuman

Untuk mengetahui macam-macam hukuman dalam jinayah harus ditinjau dalam berbagai segi, yaitu:

Pertama, jika ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancam hukuman, maka hukuman dapat dibagi:

- 1) Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.. Seperti zina, qadzaf (penuduh zina), minum-minuman keras, pencurian, pemberontakan, murtad dan perampokan.
- 2) Hukuman qishash dan diat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qishash dan diat. Misalnya pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja), penganiayaan sengaja dan penganiayaan karena kesalahan (tidak sengaja).
- 3) Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qishash dan diat dan beberapa jarimah ta'ziir. Misalnya pembunuhan karena kekeliruan (tidak sengaja) dan menyerupai sengaja.
- 4) Hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarima-jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua

perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya⁵⁵.

Sedangkan macam-macam hukuman pada hukum pidana Indonesia (hukum positif), hukuman terdiri atas dua jenis, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan tentang jenis-jenis pidana:

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Pidana kurungan,
4. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
2. Perampasan beberapa barang, dan
3. Pengumuman putusan hakim⁵⁶.

Hukuman mati dijatuhkan atas kejahatan-kejahatan berat, seperti kejahatan terhadap keamanan Negara, pembunuhan yang dirncanakan, pencurian dengan pemberatan, dan pembajakan dilaut⁵⁷.

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. 163

⁵⁷ *Ibid*

Kedua, jika ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman lain, maka hukuman dapat dibagi 4 (empat) yaitu:

1. Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qisas untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, potong tangan untuk jarimah pencurian.
2. Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash.
3. Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri. Misal larangan menerima warisan bagi pembunuh keluarga sebagai tambahan qishash atau diyat.
4. Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman mengikuti hukum pokok dengan syarat ada keputusan sendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisah dengan hukuman tambahan. Misalnya mengalungkan tangan pencuri yang sudah dipotong keleher⁵⁸.

Ketiga, jika ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman, maka hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:

⁵⁸ *Ibid*

1. Hukuman yang mempunyai 1 (satu) batas, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendahnya. Seperti hukum jilid (dera) sebagai hukuman had (80 atau 100 kali dera). Dalam hukum jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
2. Hukuman yang punya batas tertinggi dan terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir⁵⁹.

Keempat, jika ditinjau dari segi keharusan untuk menjatuhkan hukuman tersebut, maka hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukuman yang telah ditentukan (*'Uqubah Muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutusya tanpa mengurangi, atau menggantinya dengan hukuman lain. Hukman ini disebut dengan hukuman keharusan (*'Uqubah Lazimah*). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkan atau memaafkannya.
2. Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Ghair Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukum-hukum yang ditetapkan syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut hukum

⁵⁹ *Ibid*

pilihan (*'Uqubah Mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut⁶⁰.

Kelima, jika ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Hukuman badan (*'Uqubah Badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
2. Hukuman jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
3. Hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diat, denda, dan perampasan harta⁶¹.

2. Tujuan Hukuman

Suatu hukuman itu mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari hukuman yang diterapkan, meskipun tidak disenangi, demi mencapai kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat, yaitu sebagai berikut;

- a) Hukuman mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Atau menurut ibn Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (*preventif*) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (*represif*).

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

- b) Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberatkan. Demikian sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingankan.
- c) Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan ibn Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahan-Nya harus bermaksud melakukan ihsan dan member rahmat kepada-Nya, seperti seorang bapak yang member pelajaran kepada anak-Nya.
- d) Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat⁶².

E. Syarat-syarat Untuk Menjatuhkan Hukuman.

Agar hukuman itu diakui keberadaannya maka, dalam fiqh jinayah membentuk syarat-syarat dalam menjatuhkan hukuman. Adapun syarat-syaratnya adalah:

1. Hukuman harus ada dasarnya dari syara'.

⁶² Prof. Drs. H. A. Djazuli, *Op. Cit*, h.27-28

Hukuman dianggap mempunyai dasar (syari'iyah) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara', seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', atau Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri) seperti dalam hukum ta'zir.

2. Hukuman harus bersifat pribadi.

Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban.

3. Hukuman harus berlaku untuk umum.

Berlaku untuk umum, ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apapun pangkatnya, jabatan, status, dan kedudukannya. Didepan hukum semua orang statusnya sama, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, antara pejabat dengan rakyat biasa, antara bangsawan dengan rakyat jelata⁶³.

F. Sebab-sebab Dihapuskannya Hukuman.

Dalam uraian yang lalu telah dijelaskan tentang sebab-sebab hapusnya pertanggungjawaban pidana. Adapun yang menjadi sebab-sebab dihapusnya pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1. Paksaan.

⁶³ *Ibid*

Paksaan adalah mendorong orang lain atas sesuatu yang tidak diinginkannya, baik berupa ucapan atau perbuatan.

2. Mabuk.

Mabuk adalah hilangnya akal sebagai akibat minum minuman keras atau khamar atau sejenisnya.

3. Gila.

Gila adalah hilangnya akal, rusak, atau lemah.

4. Dibawah umur.

Adapun kriteria dikatakan sebagai anak dibawah umur dalam fiqh jinayah, adalah sebagai berikut:

a) Masa tidak adanya kemampuan berfikir (idrak)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Seorang anak yang belum tamyiz, karena belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun, apabila ia melakukan suatu tindak pidana, maka ia tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan hukuman had apabila ia melakukan jarimah hudud dan tidak dikenakan qishash apabila ia melakukan jarimah qishash.

b) Masa kemampuan berfikir yang lemah

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia 19 (sembilan belas) tahun (balig). Pada masa kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban

pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, qishash maupun ta'zir. Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukan tindak pidana dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai pengulang kejahatan.

c) Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia 18 (delapan belas) tahun. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya⁶⁴.

Berbeda dengan hapusnya hukuman karena tersebut diatas maka adapula hukuman yang tidak dapat dilaksanakan. Hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim, berhubung tempat (badan atau bagiannya) untuk melaksanakan hukuman sudah tidak ada lagi, atau waktu untuk melaksanakannya telah lewat⁶⁵.

Adapun sebab-sebab tidak dapat dilaksanakan hukuman tersebut, sebagai berikut:

⁶⁴ *Ibid*, h. 117-135

⁶⁵ *Ibid*

1. Pelaku meninggal dunia, kecuali untuk hukuman yang berupa denda, diyat, dan perampasan harta.
2. Hilangnya anggota badan yang harus di kenai hukuman, maka hukumannya berpindah kepada diyat dalam kasus jarimah qishash.
3. Tobat dalam kasus *jarimah hirabah*, meskipun Ulil Amri dapat menjatuhkan hukuman ta'zir kemaslahatan umum menghendaknya.
4. Perdamaian dalam kasus jarimah qishash dan diyat. Dalam hal ini pun Ulil Amri dapat menjatuhkan hukuman ta'zir bila kemaslahatan umum menghendaknya.
5. Pemaafan dalam kasus qishash dan diyat serta dalam kasus jarimah ta'zir yang berkaitan dengan hak adami.
6. Diwarisinya qishash . Dalam hal ini pun Ulil Amri dapat menjatuhkan hukuman ta'zir, seperti ayah membunuh anaknya.
7. Kadaluwarsa. Menurut Imam Malik, Syafi'I, dan Ahmad di dalam hudud tidak ada kadaluwarsa, dalam jarimah ta'zir masalah kadaluwarsa diperbolehkan bila ulil amri menganggap padanya terdapat kemaslahatan umum⁶⁶. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dalam kasus jarimah ta'zir bisa di terima adanya kadaluwarsa. Ada pun dalam jarimah qishash , diyat, dan jarimah qadzaf tidak diterima adanya kadaluwarsa⁶⁷.

⁶⁶ Prof. Drs. H. A. Djazuli, *Op. Cit*, h. 33

⁶⁷ *Ibid*, h. 33-34

Dalam hal ini diterimanya kadaluwarsa dalam jarimah ta'zir, itu bilamana pembuktiannya melalui persaksian dan para saksinya tidak memberikan persaksiannya dalam waktu enam bulan setelah kasus itu terjadi⁶⁸.

Dari paparan di atas ada kesan yang kuat bahwa di dalam menjatuhkan hukuman, kepentingan korban kejahatan dan kepentingan pelaku kejahatan harus ada pertimbangan secara seimbang. Dengan demikian rasa keadilan masyarakat bisa tercapai⁶⁹.

Dilihat dari segi hukum positif dihapusnya suatu hukuman karena telah lewat batas waktunya sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP, yang berbunyi:” Hak menuntut suatu hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya”. Didalam ayat 2 pasal 78 ditentukan pula bagi orang yang melakukan tindak pidana itu umurnya belum cukup 18 tahun maka tempo gugur tersebut diatas dikurangi sehingga menjadi 1/3, sedangkan dalam pasal 84 KUHP ditentukan pula lewat waktu tentang hak menjalankan hukuman hapus karena terhitung meninggal dunia⁷⁰.

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Prof. Chainur Arrasjid, S.H, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grapika, 2000), h. 139-140.

BAB IV

HUKUMAN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN

TINDAK PIDANA DIPENGADILAN NEGERI PEKANBARU

DITINJAU MENURUT FIQH JINAYAH

A. Bentuk Hukuman Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana.

Sebelum penulis masuk ke tinjauan fiqh jinayahnya, maka terlebih dahulu penulis akan memberikan gambaran tentang kasus-kasus tindak pidana serta hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri, adapun kasus-kasusnya adalah sebagai berikut:

1. Kasus Pencurian Oleh Abdul Rahman No. 34/Pid.B/A/2010/PN.PBR

Terdakwa Abdul Rahman bersama Andri Saputra (berkas diajukan terpisah) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam tanggungjawabnya masing-masing pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2009 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009, bertempat di jalan Angkasa tepatnya di depan Kelentang Air Hitam Pekanbaru atau setidaknya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah mengambil sesuatu barang berupa tas sandang, yang sama sekali atau kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ABDUL RAHMAN Als RAHMAN telah berencana untuk mengambil barang milik orang lain bersama ANDRI SAPUTRA Als ANDRI bin SALIM (berkas diajukan terpisah), selanjutnya terdakwa dibonceng ANDRI dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA FIZR warna hitam Nomor Polisi BM 6556 TB, yang mana ANDRI telah menemukan sasaran yakni saksi korban ATRALIA Als LIA yang sedang menyanggah tas yang berbonceng dengan saksi BENI SYAPUTRA dan kemudian ANDRI langsung memepet sepeda motor saksi BENI, setelah dekat ANDRI langsung menyuruh terdakwa menarik tas sandang milik saksi korban, hingga terdakwa berhasil menguasai tas sandang tersebut, namun saksi korban langsung jambret, lalu saksi BENI langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ANDRI dan sesampainya dipersimpangan, saksi BENI berhasil menarik baju terdakwa (RAHMAN) terjatuh dan langsung tertangkap oleh massa, sedangkan ANDRI saat itu melarikan diri dengan sepeda motornya. Setelah dilakukan penyidikan Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Desember 2009 s/d 26 Januari 2010 maka terdakwa diancam dengan pidana dalam pasal 363 KUHP dengan ketentuan sebagai berikut:

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat peradilan pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : ABDUL RAHMAN Als RAHMAN
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 16 tahun/ 13 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bukit Raya Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Muat Batu

MENGADILI

- 1) Menyatakan terdakwa Abdul Rahman Als Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan karena melanggar pasal 363 KUHP
- 2) Menghukum terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5) Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas sandang warna crem merk Yong Liang;
 - b. Dipergunakan dalam perkara lain

- 6) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah)⁷¹

Pada kasus pencurian pelakunya adalah anak dibawah umur, yang bernama Abdul Rahman Als Rahman yang berumur 16 tahun (enam belas), hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri adalah 3 bulan 15 hari penjara dimulai hitungannya semenjak menjadi tahanan, dasar hakim memutuskan hukuman tersebut adalah pasal 363 KUHP, yang mana tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran supaya anak tersebut jera atau tidak melakukan tindak pidana lagi, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri bukanlah hukuman pokok, karena hukuman pokok pada kasus pencurian yang dilakukan oleh orang dewasa adalah 7 tahun penjara⁷².

2. Kasus Pemerasan Oleh Ade Irawan Putra Als Bocet No. 34/Pid.B/A/2010/PN.PBR

Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2010 sekitar jam 14.30 Wib pagi di persimpangan Jln. Cokroaminoto dengan Jln A. Yani Pekanbaru terdakwa bersama Rony telah melakukan pemerasan terhadap korban dengan meminta uang korban, karena korban tidak mau memberikannya korban dipukuli sewaktu korban kesakitan terdakwa menyuruh temannya Rony untuk mengambil uang yang saat itu ada ditangan korban dan setelah itu terdakwa dan temannya pergi dan mereka menyuruh korban pergi;

⁷¹ Putusan Nomor 34/Pid.B/A/2010/PN.PBR

⁷² Abdul Rahman (Terdakwa), *Wawancara*, Pekanbaru : 05 Januari 2011

Setelah dilakukan penyidikan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru maka terdakwa diancam dengan pidana 368 KUHP dengan ketentuan sebagai berikut:

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah dijatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : Ade Irawan Putra Als Bocet
 Tempat lahir : Pekanbaru
 Umur/ tanggal lahir : 17 tahun/ 20 Desember 1991
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan :Indonesia
 Tempat tinggal : Jln. Srikandi Perum Widya Graha Blok I
 Agama : Islam
 Pekerjaan : -

MENGADILI

- 1) Menyatakan terdakwa Ade Irawan Putra Als Bocet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 368 KUHP
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan

- 3) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah)⁷³.

Pada kasus pemerasan pelakunya bernama Ade Irawan Putra, yang berumur 17 tahun (tujuh belas), yang mana dia dikategorikan anak dibawah umur, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri adalah 5 bulan penjara dimulai hitungannya semenjak menjadi tahanan, dasar hakim memutuskan hukumannya adalah pasal 368 KUHP, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri bukanlah hukuman pokok, karena hukuman pokok pada kasus pemerasan yang dilakukan oleh orang dewasa adalah 9 tahun (sembilan tahun) penjara⁷⁴.

B. Tinjauan Fiqh Jinayahnya Terhadap Hukuman Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana

Dalam fiqh jinayah setiap orang yang melakukan tindak pidana dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Tindak pidana dalam fiqh jinayah disebut juga dengan jarimah. Jarimah adalah *melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama)*⁷⁵.

Jarimah baru bisa dikatakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur. Adapun unsur-unsurnya adalah:

⁷³ Putusan Nomor: 417/Pid.B/A/2010/PN.PBR

⁷⁴ Ade Irawan Putra (Terdakwa), *Wawancara*, Pekanbaru : 06 Januari 2011

⁷⁵ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. 9

- a. Unsur formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif)
- c. Unsur moral adalah orang yang cakap (mukallaf), yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih dibawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana⁷⁶.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkannya, namun pada prinsipnya dalam fiqh jinayah ada beberapa hal yang menyebabkan hapusnya pertanggungjawaban pidana yaitu salah satunya adalah anak dibawah umur, sekaligus anak dibawah umur juga menyebabkan hapusnya hukuman atau anak dibawah umur tidak bisa dikenai hukuman. Anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana tidak dikenai hukuman berarti bebas dari hukuman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi:

⁷⁶ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. 28

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة عن انائم حتى يستيقظ و عن المبتللى حتى يبرأ و عن الصابى حتى يكبر

Artinya: “Dari Aisyah ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa⁷⁷”. (HR. Imam Ahmad dan Abu Daud)

Adapun kriteria dikatakan sebagai anak dibawah umur dalam fiqh jinayah, adalah sebagai berikut:

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir (idrak)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Seorang anak yang belum tamyiz, karena belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun, apabila ia melakukan suatu tindak pidana, maka ia tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan hukuman had apabila ia melakukan jarimah hudud dan tidak dikenakan qishash apabila ia melakukan jarimah qishash.

2. Masa kemampuan berfikir yang lemah

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia 18 (delapan belas) tahun (balig). Pada masa kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, qishash maupun ta'zir. Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai

⁷⁷ Jalaluddin As Sayuthi, *Al Jami' Ash Shagir*, Juz II, Dar Al Fikr, Beirut, h. 24

hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukan tindak pidana dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai pengulang kejahatan.

3. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia 18 (delapan belas) tahun. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya⁷⁸.

Pada kasus pencurian pelakunya bernama Abdul Rahman, yang dikategorikan anak dibawah umur, yang usianya berumur 16 (enam belas) tahun, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri, dasar hakim memutuskan hukuman, yang mana tujuannya, hukuman yang dijatuhkan bukanlah hukuman pokok, karena pada dasarnya hukuman pencurian yang dilakukan oleh orang dewasa adalah 7 tahun (tujuh) penjara.

Adapun hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri tersebut, yang melakukan tindak pidana, yang pelakunya dianggap umurnya masih dianggap sebagai anak dibawah umur. Pada kasus pencurian dihukum dengan 3 (tiga) bulan penjara, yang hukuman dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri adalah hukuman untuk anak dibawah umur, jadi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri tersebut bukanlah hukuman pokok.

⁷⁸ DRS. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. 135

Sudut pandang fiqh jinayahnya terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri tadi terhadap Abdul Rahman pada kasus pencurian secara fiqh jinayah dibenarkan atau boleh saja, karena hakim dalam memutuskan hukuman tersebut dengan berbagai pertimbangan, karena dalam fiqh jinayah anak dibawah umur tidak bisa dikenai hukuman pokok, bahkan bisa bebas dari hukuman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“Dari Aisyah ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa⁷⁹”. (HR. Imam Ahmad dan Abu Daud)

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan anak dibawah umur bisa juga dikenai hukuman pengganti, karena anak dibawah umur tidak memenuhi syarat untuk dikenai hukuman pokok, karena syarat moralnya adalah harus baigh (mukallaf). Dalam hal ini bisa saja dikenai hukuman pengganti yaitu hukuman ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang tidak diatur oleh nash yakni hukuman yang diserahkan kepada ulil amri untuk menentukan bentuk-bentuk hukumannya, dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum.

Jadi kalau ulil amri memandang bahwa hukuman itu memang untuk kemaslahatan, anak dibawah umur tersebut bisa saja dikenai hukuman, tapi pada dasarnya anak dibawah umur tidak dikenai hukuman, tapi bisa saja dikenai hukuman pengganti dari hukuman pokok seperti hukuman ta'zir,

⁷⁹ Jalaluddin As Sayuthi, *Op. Cit*, h. 24

seseuai dengan perbuatan yang dilakukannya, tapi sifatnya untuk mendidik atau sebagai pengajaran.

Dalam fiqh jinayah hukuman pokok pada jarimah pencurian, yang mana pencurinya sudah baliqh dan sudah mencukupi nasabnya yaitu $\frac{1}{4}$ dinar, maka hukumannya adalah potong tangan.

Demikian juga terhadap kasus pemerasan yang dilakukan oleh Ade Irawan, yang melakukan tindak pidana yang berumur 17 tahun (tujuh belas), yang mana hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri adalah 5 (lima) bulan penjara, yang mana hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tersebut bukanlah hukuman pokok dan hukuman yang dijatuhkan bersifat pengajaran, sebagaimana kasus pemerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang mana hukumannya adalah 9 tahun (Sembilan tahun) yang mana diatur dalam pasal 368 KUHP

Sedangkan dari sudut pandang fiqh jinayahnya tindakan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam kasus pemerasan secara fiqh jinayahnya dibolehkan, karena anak dibawah umur tidak dikenai hukuman, bisa saja untuk kemaslahatan. Jika anak dibawah umur tersebut tidak dikenai hukuman, maka ia akan meraja lela. Maka anak tersebut bisa saja dikenai hukuman pengganti. Sebagai pengganti dari hukuman pokoknya adalah hukuman ta'zir. Sedangkan ta'zir adalah hukuman yang bersifat pengajaran atau mendidik yang mana hukumannya tidak diatur oleh nash akan tetapi diserahkan kepada ulil amri untuk menentukan bentuk-bentuk hukumannya sesuai dengan tindak

pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini bisa saja ulil amri membebaskannya dari hukuman atau bisa saja dikenai hukuman.

Dalam fiqh jinayah pemerasan dikategorikan dengan perampokan (hirabah). Pengertian perampokan adalah mengambil barang orang lain dengan memaksa. Misalnya perampokan indentik dengan cara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan atau bisa juga berupa ancaman⁸⁰.

Adapun sanksi hukum bagi pelaku pemerasan atau perampokan adalah lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian, hukuman pemerasan atau perampokan adalah dibunuh, atau disalib, atau dipotong silang (dipotong tangan dan kakinya), atau dibuang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 33, yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar”⁸¹. (QS. Al-Maidah: 33)

⁸⁰ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, h. 69

⁸¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 113

Adapun syarat-syarat yang bisa dikatakan perbuatan pemerasan atau perampokan adalah sebagai berikut:

1. Baligh dan berakal.
2. Menggunakan senjata atau berupa ancaman.
3. Tempat ramai maupun jauh dari keramaian.
4. Terang-terangan⁸².

Jadi menurut penulis terhadap kasus anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana hendaknya tidak dikenai hukuman penjara, karena dengan hukuman penjara tersebut sangat besar mudharatnya, misalnya anak tersebut tidak mau melanjutkan sekolahnya lagi setelah keluar dari penjara.

⁸² Zainuddin Ali, *Op. Cit*, h. 69

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di pengadilan negeri, disimpulkan bahwa hukuman bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana di pengadilan negeri adalah sebagai berikut:

1. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri pekanbaru terhadap anak dibawah umur, seperti kasus pencurian hukuman yang dijatuhkannya adalah selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari penjara dan kasus pemerasan hukumannya adalah 5 (lima) bulan penjara, bahwa hukuman yang dijatuhkan itu bukanlah sepenuhnya hukuman pokok dari tindak pidana itu sendiri. Tapi hukuman pokok yang sudah dikurangi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari hukuman pokok, disebabkan pelakunya adalah anak dibawah umur.
2. Dalam fiqh jinayah anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri bisa dibenarkan, karena dalam fiqh jinayah anak dibawah umur tidak dikenai hukuman, bisa saja untuk kemaslahatan. Jika anak dibawah umur tersebut tidak dikenai hukuman, maka ia akan meraja lela. Maka anak tersebut bisa saja dikenai hukuman pengganti. Sebagai pengganti dari hukuman pokoknya adalah hukuman ta'zir. Sedangkan ta'zir adalah hukuman yang sifatnya pengajaran atau mendidik yang mana hukumannya tidak diatur oleh nash, akan tetapi diserahkan kepada ulil amri untuk menentukan bentuk-bentuk

hukumannya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini bisa saja ulil amri membebaskannya dari hukuman atau bisa saja dikenai hukuman.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diambil oleh penulis dari hasil penelitian dalam pembahasan diatas, dengan ini penulis akan memberikan saran yang nantinya dapat menjadi masukan untuk hakim yang menangani perkara pidana anak dipengadilan negeri sebagai berikut:

1. Aparatur pemerintahan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, agar dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan Undang-undang yang berlaku tanpa pandang bulu.
2. Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim, dalam menyelesaikan kasus anak dibawah umur hendaknya memperhatikan kepada kemaslahatan masyarakat, agar dengan keputusan tersebut bisa menghasilkan kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat. Akan tetapi Majelis Hakim harus mengedepankan kepentingan anak untuk kedepannya.
3. Bagi masyarakat sebaiknya lebih mencari informasi yang lebih banyak mengenai hukuman terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana, seperti Undang-undang tentang pengadilan anak, buku-buku hukum pidana dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2007).
- Arrasjid Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Chazawi Adamin, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Cholis M. Nasir, *Fiqh Jinayah*, (Pekanbaru: Susqa Press, 2000).
- Depag, RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987).
- Djazuli. A, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Kansil. C. S. T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Muslich Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2004).
- Prints Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Salam Moch. Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005).
- Saleh Hasan, *Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani ress, 2003).
- Saraswati Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009).
- Sayuthi As Jalaluddin, *Al Jami' Ash Shagir*, Juz II, Dar Al Fikr, Beirut.
- Soesilo. R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1996).

Soetodjo Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).

Supeno Hadi, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010).

Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta; Djanbatan, 2007).

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Perlindungan Anak UU No. 23 Tahun 2002 Penjelasan umum Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada alenia ke-5*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007).

WAWANCARA

1. Hukuman yang di jatuhkan dihitung sejak kapan?
2. Apa saja kegiatan yang dilakuakn?
3. Hukuman yang di jatuhkan apakah selamanya dalam penjara?
4. Yang memberikan kegiatan itu dari mana saja ?
5. Apa saja efek samping dari hukuman yangt dijatuhkan?